

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Isu Strategis Inclusive Public Services

Kamis, 26 Oktober 2022 | 10.00 – 12.00

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2023-2024, Sekretariat OGI melaksanakan rapat pendalaman dengan K/L terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sosial. Rapat ini merupakan awalan untuk menyesuaikan rencana kerja K/L dengan usulan proposal CSO, serta membuka peluang kerjasama antara K/L dengan CSO.

TUJUAN

1. Pemberian pendapat K/L terkait terhadap proposal CSO
2. Penerimaan dan Penyesuaian K/L terhadap proposal CSO untuk diteruskan pada rapat selanjutnya terkait dengan Penyusunan RAN OGI 2023 – 2024.

PEMBAHASAN

1. **Theodorus**, dari Sekretariat Open Government Indonesia memberikan pengantar dalam rangka pembukaan rapat pendalaman isu dengan K/L terkait sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Open Government Indonesia dibentuk dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam *Open Government Partnership* (OGP). Setiap dua tahunnya, Sekretariat OGI memfasilitas penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia. Penyusunan dilakukan secara kokreasi antara K/L dengan CSO pengusul untuk memastikan terjadinya kolaborasi aktif dan bermakna dalam RAN OGI.
 - b. Pada kesempatan kali ini, proposal yang akan dibahas ialah proposal terkait dengan isu strategis Inclusive Public Services yang diusulkan oleh CSO Suarise dan juga Media Link.
 - c. Bapak/Ibu dari K/L terkait dapat memberikan tanggapan terkait dengan usulan proposal, serta memberikan pandangan apakah proposal tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama dalam kerangka Rencana Aksi Nasional OGI 2023-2024.
2. **Ibu Rahma** dari Suarise sebagai CSO pengusul akses digital bagi disabilitas memberikan paparan sebagai berikut:
 - a. Di Indonesia terdapat 26 juta masyarakat yang menyandang disabilitas. Namun, akses disabilitas pada akses digital memiliki permasalahan karena belum mudahnya akses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pada berbagai bentuk layanan digital baik itu website, aplikasi, aplikasi, hingga dokumen digital.
 - b. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) disabilitas merupakan pengguna minoritas; (2) kurangnya pengetahuan mengenai aksesibilitas digital dalam sistem pendidikan dan standar profesional; (3) terbatasnya tenaga ahli yang memahami aksesibilitas digital. (4) kesalahpahaman; dan (5) penerapan aksesibilitas digital yang tidak tepat. Oleh sebab itu diperlukan dokumen maupun panduan terkait aksesibilitas digital yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong organisasi publik lainnya untuk memberikan aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas seluas-luasnya.

3. **Bapak Hardy**, dari Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik menyampaikan terkait perkembangan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait aksesibilitas digital bagi disabilitas dalam rangka RAN HAM sebagai berikut
 - a. Penyusunan NSPK akan dilakukan dalam kerangka penyusunan Peraturan Menteri Kominfo. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan dan landasan hukum terkait dengan pelaksanaan aksesibilitas digital bagi organisasi publik.
 - b. Progress sejauh ini ialah telah disusunnya Naskah Akademik terkait Permen Aksesibilitas Digital bagi disabilitas. NA tersebut berisi mengenai pemetaan disabilitas, layanan yang digunakan, serta treatment untuk setiap disabilitas mengenai aksesibilitas digital. Namun isu terkait aksesibilitas digital terkait dengan dokumen belum sepenuhnya tertuang dalam NA. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik Dit. TKKKP selaku pengampu penyusunan NA membuka peluang kerjasama dengan Suarise seluas-luasnya sejak dini. Terkait usulan Suarise Matriks Target Capaian 2023-2024, sebagian besar sudah bisa dilaksanakan tahun ini.
4. **Theodorus**, memberikan pandangan terkait dengan potensi kerjasama dini dan juga peluang kerjasama di 2023-2024:
 - a. Keterlibatan sejak dini terkait dengan usulan penyusunan pedoman sangat baik, terlebih lagi Kominfo juga terbuka dengan keterlibatan rekan-rekan Suarise. Namun, proposal Suarise perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang ingin dilakukan pada 2023-2024. Hal tersebut dikarenakan usulan tersebut sudah diterima, dan implementasi di 2023-2024 juga perlu disesuaikan karena penyusunan Pedoman, dalam hal ini Permen, sudah diselesaikan dan hanya disosialisasikan pada tahun 2023.
 - b. Sekretariat memberikan waktu bagi teman-teman Suarise selaku pengusul untuk berdiskusi dengan Kominfo untuk melaksanakan penyesuaian mengenai usulan proposal RAN OGI 2023-2024.

Rapat terkait usulan Media Link tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran perwakilan Kementerian Sosial dalam rapat tersebut. Sekretariat OGI akan melakukan penjadwalan ulang dengan mengundang stakeholders terkait.

KESIMPULAN

Proposal dari Suarise diterima dengan baik oleh Kominfo karena sesuai dengan agenda penyusunan NSPK Kominfo dalam kerangka RAN HAM. Usulan proposal Suarise sudah bisa dilaksanakan sejak dini, sehingga diperlukan penyesuaian terkait dengan usulan proposal suarise.

Dokumentasi



